

RENCANA KERJA

INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

TAHUN 2018



RENJA 2018



INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

Jl. Trikora No. 1 Gedung Serbaguna Lt. 2, Banjarbaru



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

INSPEKTORAT

Jalan Trikora No.1 Gedung Serba Guna Lt. 2 Telp. (0511) 4780069 Banjarbaru

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BANJARBARU NOMOR 036 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU TAHUN 2018

INSPEKTUR KOTA BANJARBARU

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru;
 - b. bahwa Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Banjarbaru tahun 2018 ditetapkan sebagai pedoman di lingkungan Inspektorat dalam menyusun program dan kegiatan prioritas sektor pengawasan pada tahun anggaran berkenaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Banjarbaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarbaru tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2011–2015 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor

- 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomer 15 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru tahun 2014 nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12);
15. Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021;
17. Keputusan Inspektur Kota Banjarbaru Nomor 023 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021;

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Inspektur Kota Banjarbaru Tentang Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2018;
- KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2018 memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju dengan berpedoman pada Renstra SKPD Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021.
- KETIGA : Sistematika RENJA Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2018, meliputi :
- Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu
 - Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
 - Bab IV : Penutup
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 29 Juni 2017

INSPEKTUR KOTA BANJARBARU,



Drs. M.SYAIFULLAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19571116 198602 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Banjarbaru (Sebagai Laporan)
2. Inspektur Kota Banjarbaru
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru
4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru
5. Semua Kepala Bidang pada Inspektorat Kota Banjarbaru
6. PPK dan PPTK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha Esa, kerana atas berkat dan rahmatNya jualah, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2018

Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Inspektorat tahun 2018 sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat di sektor pengawasan yaitu dalam rangka merealisasikan misi Renstra Inspektorat tahun 2016-2021 serta untuk mendukung pencapaian visi dan misi jangka menengah Pemerintah Daerah tahun 2016-2021.

Kami menyadari bahwa dokumen Renja ini masih jauh dari sempurna, untuk itu masukan dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan dari pihak-pihak yang berkepentingan, untuk perbaikan Renja Inspektorat selanjutnya.

Harapan kami Renja Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2018 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengawasan Inspektorat Kota Banjarbaru, yang tentunya dalam rangka sekaligus menunjang tercapainya RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021.

Banjarbaru, 29 Juni 2017

INSPEKTUR KOTA BANJARBARU,



Drs. M.SYAIFULLAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19571116 198602 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RENJA.....	1
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	8
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu & Capaian Renstra SKPD.....	11
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	17
2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	18
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	24
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	25
3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	27
3.3 Program dan Kegiatan	30
BAB IV PENUTUP	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pasal 137 mengatur tentang tahapan dan Tatacara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah (Renja SKPD).

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Inspektorat Kota Banjarbaru mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2018, dengan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru tahun 2018, Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021, dengan tetap memperhatikan Renja Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan dan Renja Irjen Kementrian Dalam Negeri, sehingga terwujud sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan antar pemerintah pusat dan daerah.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (**RENJA SKPD**) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah dan dapat ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Adapun proses penyusunan Renja Inspektorat Kota Banjarbaru tahun 2017 disusun melalui 4 tahapan yakni:

1. Penyusunan Rencana, yang terdiri dari 3 langkah, yaitu:
 - 1) Menyusun rancangan awal Renja Inspektorat yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur, 2) Menyelaraskan Renja Inspektorat melalui forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD dengan melibatkan pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dan 3) Menyusun rancangan akhir Renja Inspektorat dan dikonsultasikan kepada BAPPEDA untuk ditelaah dan disesuaikan dengan substansi dokumen perencanaan daerah.
2. Penetapan rencana, rancangan akhir renja Inspektorat yang telah dikonsultasikan ke Bappeda dan telah mendapat rekomendasi dari Bappeda selanjutnya ditetapkan oleh Inspektur.

3. Pengendalian pelaksanaan rencana, yang dimaksud untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam renja Inspektorat.
4. Evaluasi pelaksanaan rencana, mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi serta untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pengawasan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen Renja Inspektorat mencakup masukan (infut), keluaran (outfut) dan hasil (outcome)

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RENJA

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

- 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
 16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomer 15 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota

Banjarbaru Nomor 6 tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru tahun 2014 nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru nomor 11 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Banjarbaru tahun 2018 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan resmi bagi Inspektorat dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun anggaran 2018.

Penyusunan Renja Inspektorat Kota Banjarbaru tahun 2018 bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan antar Rencana Kerja (Renja) Inspektorat dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renja SKPD Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I	Pendahuluan,	1.1	Latar Belakang
	meliputi	1.2	Landasan hukum,
		1.3	Maksud dan tujuan, dan;
		1.4	Sistimatika penulisan
Bab II	Evaluasi	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja
	pelaksanaan Renja		Inspektorat tahun lalu dan

SKPD Tahun lalu	capaian Renstra SKPD
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
	2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
	2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD.
	2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
Bab III	Tujuan, Sasaran, Program & Kegiatan
	3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD.
	Program dan Kegiatan
Bab IV	Penutup
	4.3 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya, maupun terkait dengan ketersediaan anggaran apabila tidak sesuai dengan kebutuhan,
	Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut.
Lampiran-lampiran	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Inspektorat Tahun

2016 dan Prakiraan Maju Tahun
2017

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu & Capaian

Renstra SKPD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja SKPD merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggara pemerintah, dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, maka akan diperoleh informasi kinerja SKPD, yang dapat menjadi bahan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran Renja SKPD dengan didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang akurat, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan menjadi lebih efektif dan efisien, sedangkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan Renja SKPD dapat diukur dengan menggunakan indikator program/kegiatan yang telah dirumuskan secara tepat dan ditetapkan dalam dokumen Renstra SKPD.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat tahun lalu (2016) dan capaian Renstra Inspektorat menjelaskan mengenai:

- a. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun n-2 (tahun 2016) dan perkiraan capaian Tahun n-1 (tahun 2017) dengan mengacu pada APBD tahun berjalan (2016).

- b. Pencapaian target Renstra Inspektorat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat tahun-tahun sebelumnya.
- c. Reviu hasil evaluasi pelaksanaan renja Inspektorat tahun 2017, dan realisasi Renstra Inspektorat mengacu pada hasil laporan kinerja Inspektorat tahun 2016 dan atau realisasi APBD Inspektorat tahun 2016.

Evaluasi hasil pelaksanaan renja Inspektorat tahun 2016 dan pencapaian kinerja Renstra Inspektorat disajikan pada table dibawah ini.

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD
KOTA BANJARBARU
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2016

NAMA SKPD : INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2016 (Awal Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD tahun lalu(n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab		
									I				II													III	IV
									8		9		10	11	12=8+9+10+11											13=12/7x100%	
2	3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15				
1.20	PEMERINTAHAN UMUM																										
1.20.06	INSPEKTORAT																										
1.20.6.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	439.239.000	100%	287.255.721	100%	439.239.000	100%	43.231.979		94.330.080				100%	137.562.059	100%	31,32	100%	424.817.780	100%	96,72	Inspektorat			
1.20.6.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	300 lbr	1.500.000	240 lbr	1.200.000	300 lbr	1.500.000	-	750.000		-				-	750.000	300 lbr	50,00	300 lbr	1.950.000	300 lbr	130,00				
1.20.6.01.02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Telepon & Internet	12 bln	24.000.000	12 bln	10.277.461	12 bln	24.000.000	3 bln	1.839.979	3 bln	2.659.430				3 bln	4.499.409	12 bln	18,75	12 bln	14.776.870	12 bln	61,57				
1.20.6.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bln	24.000.000	12 bln	4.583.000	12 bln	24.000.000	3 bln	2.755.000	3 bln	9.617.500				3 bln	12.372.500	12 bln	51,55	12 bln	16.955.500	12 bln	70,65				
1.20.6.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan Kantor	2 org	14.400.000	12bln	14.400.000	2 org	14.400.000	2 org	2.400.000	2 org	3.600.000				2 org	6.000.000	2 org	41,67	2 org	20.400.000	2 org	141,67				
1.20.6.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bln	25.000.000	12bln	20.830.750	12 bln	25.000.000	3 bln	6.250.000	3 bln	6.250.000				3 bln	12.500.000	12 bln	50,00	12 bln	33.330.750	12 bln	133,32				
1.20.6.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bln	20.000.000	12bln	15.216.100	12 bln	20.000.000	3 bln	2.000.000	3bln	7.375.000				3 bln	9.375.000	12 bln	46,88	12 bln	24.591.100	12 bln	122,96				
1.20.6.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan, Surat kabar dan buku peraturan	36 Expl	10.000.000	12bln	8.940.000	36 Expl	10.000.000	9 expl	1.440.000	9 Expl	2.160.000				9 expl	3.600.000	36 Expl	36,00	36 Expl	12.540.000	36 Expl	125,40				
1.20.6.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makmin harian pegawai, Makmin Rapat dan Makmin Tamu	12 bulan	84.419.000	12bln	51.230.000	12 bulan	84.419.000	3 bln	12.595.000	3 bln	24.295.000				3 bln	36.890.000	12 bulan	43,70	12 bulan	88.120.000	12 bulan	104,38				
1.20.6.01.18	Rapat-rapat Koordinasi &Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi/Konsultasi	10 Kali	145.000.000	12bln	138.041.410	10 Kali	145.000.000	1 kali	7.702.000	1 kali	26.110.150				1 kali	33.812.150	10 Kali	23,32	10 Kali	171.853.560	10 Kali	118,52				
1.20.6.01.19	Penyediaan Jasa Non PMS	Jumlah Tenaga Kontrak	3 org	29.040.000	12bln	8.400.000	3 org	29.040.000	3 org	5.500.000	3 org	8.250.000				3 org	13.750.000	3 org	47,35	3 org	22.150.000	3 org	76,27				
1.20.6.01.23	Pendataan LP2P dan LHKASN	Terdatanya LP2P dan LHKASN	2 kali	61.880.000	250 SKPD	14.137.000	2 kali	61.880.000	-	-		4.013.000				-	4.013.000	2 kali	6,49	2 kali	18.150.000	2 kali	29,33				
																	37,79				101,28						

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2016 (Awal Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD tahun lalu(n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab	
									I		II		III		IV										
									8		9		10		11		12=8+9+10+11								13=12/7x100%
2	3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15				
1.20.6.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase pemeliharaan sarana prasarana	100%	374.455.000	100%	180.519.360	100%	374.455.000	100%	11.569.100		22.135.217				100%	33.704.317	100%	9,00	100%	214.223.677	100%	57,21		
1.20.6.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	15 buah/ 14 meter	31.500.000	15 buah	-	15 buah/ 14 meter	31.500.000	-		-			-	-	-	-	-	-	-	-				
1.20.6.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	20 buah/ 4 set	85.000.000	9 buah	11.000.000	20 buah/ 4 set	85.000.000	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	11.000.000	-			
1.20.6.02.10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur Aparatur	48 buah	53.300.000	33 buah/ 2 set	78.000.000	48 buah	53.300.000	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	78.000.000	-			
1.20.6.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	1 Unit	35.000.000	12 bln/ 1 unit	22.314.160	1 Unit	35.000.000	1 unit	5.583.700	1 unit	5.647.857				1 unit	11.231.557	1 unit	32,09	1 unit	33.545.717	1 unit	95,84		
1.20.6.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4	10 Unit	135.000.000	12 bln/ 9 unit	53.081.200	10 Unit	135.000.000	1 unit	5.985.400		16.487.360				1 unit	22.472.760	1 unit	16,65	1 unit	75.553.960	1 unit	55,97		
1.20.6.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	14 kali	26.800.000	6 unit	14.824.000	14 kali	26.800.000	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
1.20.6.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	87 Kali	2.855.000	27 unit	800.000	87 Kali	2.855.000	-		-					-	-	-	-	-	800.000	-	28,02		
1.20.6.02.29	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	31 kali	5.000.000	50 buah	500.000	31 kali	5.000.000	-		-					-	-	-	-	-	500.000	-	10,00		
																			6,09					47,46	
1.20.6.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	100%	120.000.000	10 lap	57.504.000	100%	120.000.000		1.351.000		21.480.050				100%	22.831.050	100%	19,03	100%	80.335.050	100%	66,95		
1.20.6.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Renstra Inspektorat tahun 2016-2020	2 Dok	30.000.000	1 dok	-	2 Dok	30.000.000				17.577.300													
1.20.6.06.05	Penyusunan Perencanaan & Pelaporan Keuangan	Tersusunnya Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	10 Dok	60.000.000		39.655.000	10 Dok	60.000.000		1.351.000		3.902.750				0%	5.253.750	0%	8,76	10 lap	44.908.750	10 lap	74,85		
1.20.6.06.09	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	Tersusunnya Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	12 bln	30.000.000	%	17.849.000	12 bln	30.000.000		-		-				0%	-	0%	-	-	12 bln	17.849.000	12 bln	59,50	
																			2,92					67,17	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2016 (Awal Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD tahun lalu(n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab				
			5		6		7		8		9		10			11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%			14 =6+12		15= 14/5 x 100%	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
2	3	4							8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 =6+12		15			
1.20.06.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	100%	2.457.058.000	77%	1.385.600.340	100%	2.457.058.000		286.459.000		535.934.750					0%	822.393.750	0%	33,47	100%	2.207.994.090	100%	89,86		
		Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100%		100%																					
1.20.06.20.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Pemeriksaan Reguler APIP Kota Banjarbaru	96 Obrik/ 12 bulan	922.842.500	96 obrik	776.354.000	96 Obrik/ 12 bulan	922.842.500		145.210.500		277.739.750					0%	422.950.250	0%	45,83	12 kali	1.199.304.250	12 kali	129,96		
1.20.06.20.02	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Penanganan Kasus	15 Kali	241.605.000	8 kasus	45.976.200	15 Kali	241.605.000		18.368.500		24.500.000					0%	42.868.500	0%	17,74	100%	88.844.700	100%	36,77		
1.20.06.20.06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Monev TLHP APIP Kota Banjarbaru	48 Obrikj	249.257.000	48 obrikj	134.991.400	48 Obrikj	249.257.000		31.980.000		33.585.000					0%	65.565.000	0%	26,30	12 kali	200.556.400	12 kali	80,46		
1.20.06.20.07	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Terlaksananya Koordinasi/ Sinkronisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan	2 kali	55.325.000	2 kali		2 kali	55.325.000		-		-					0%	-	0%	-	1 kali	22.666.040	1 kali	40,97		
1.20.06.20.10	Review RKA SKPD	Jumlah Obrik Reviu RKA	12 SKPD	110.732.500	-	22.666.040	12 SKPD	110.732.500		-		-					0%	-	0%	-	1 kali	22.666.040	1 kali	20,47		
1.20.06.20.12	Review Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan SKPD dan LKPD	32 SKPD	86.755.000	1 kali	56.162.700	32 SKPD	86.755.000		-		58.715.000					0%	58.715.000	0%	67,68	1 kali	114.877.700	1 kali	132,42		
1.20.06.20.13	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Jumlah Obrik Penilaian SPIP	31 SKPD	143.590.000	1 kali	208.095.000	31 SKPD	143.590.000		-		85.295.000					0%	85.295.000	0%	59,40	4 kali	293.390.000	1 kali	204,32		
1.20.06.20.14	Pengawasan Inventarisasi Aset	Jumlah Obrik Pemeriksaan Aset	32 Obrik	168.521.000	2 kali	15.220.000	32 Obrik	168.521.000		-		-					0%	-	0%	-	2 kali	15.220.000	1 kali	9,03		
1.20.06.20.16	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK	Monev TLHP BPK RI	10 Kali	139.380.000	4 kali	20.670.000	10 Kali	139.380.000		9.150.000		4.800.000					0%	13.950.000	4 kali	10,01		34.620.000	1 kali	24,84		
1.20.06.20.17	Pengawasan dan Pengendalian Kas Opname SKPD Pada Akhir Tahun	Jumlah Obyek Pemeriksaan Kas SKPD Akhir Tahun Anggaran	31 SKPD	75.220.000	31 SKPD	48.820.000	31 SKPD	75.220.000		-		-					0%	-	0%	-	1 kali	48.820.000	1 kali	64,90		
1.20.06.20.18	Evaluasi Lakip SKPD	Jumlah Obrik Evaluasi SAKIP/LAKIP SKPD	31 SKPD	263.830.000	30 SKPD	56.645.000	31 SKPD	263.830.000		81.750.000		51.300.000					0%	133.050.000	0%	50,43	1 kali	189.695.000	1 kali	71,90		
																			25,22				52,77			
1.20.06.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Prosentase Aparatur Memiliki Kompetensi Teknis Sesuai Bidangny	100%	208.420.000	89%	112.280.200	100%	208.420.000		3.400.000		15.480.500					0%	18.880.500	0%	9,06	100%	131.160.700	100%	62,93		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2016 (Awal Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD tahun lalu(n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab					
									I		II		III		IV															
			2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 =6+12		15= 14/5 x 100%						
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
1.20.06.21.03	Evaluasi Penilaian Angka Kredit Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Penilaian angka kredit Auditor dan P2UPD	2 kali	6.550.000	2 kali	4.190.000	2 kali	6.550.000		-		-				0%	-	0%	-	2 kali	4.190.000	2 kali	63,97							
1.20.06.21.06	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah pelaksanaan Bintek/Pelatihan Kantor Sendiri	15 kali	23.370.000	10 kali	16.505.000	15 kali	23.370.000		-		4.900.000				0%	4.900.000	0%	20,97	10 org	21.405.000	10 kali	91,59							
1.20.06.21.08	Diklat Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Peserta Diklat Pengawasan	15 Ok	178.500.000	8 orang	91.585.200	15 Ok	178.500.000		3.400.000		10.580.500				0%	13.980.500	0%	7,83	5 org	105.565.700	8 org	59,14							
																		9,60				71,57								
			3.599.172.000		2.023.159.621		3.599.172.000		346.011.079		689.360.597																			
																				20,37								74,73		

Tabel 2 Pencapaian Kineja Pelayanan Skpd Inspektorat

No	Indikator	Target Restra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2016 (n-2)	Tahun 2017 (n-1)	Tahun 2018 (n)	Tahun 2019 (n+1)	Tahun 2016 (n-2)	Tahun 2017 (n-1)	Tahun 2018 (n)	Tahun 2019 (n+1)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase penurunan jumlah temuan	110 temuan	100 temuan	90 temuan	80 temuan	97 temuan		90 temuan	80 temuan	
2	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	80%	82%	100%	100%	79,31%			100%	
3	Persentase Penyelsaian Pengaduan Masyarakat	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Nilai/Predikat SAKIP SKPD	CC	B	B	B	CC		B	BB	
5	Level Matritas SPIP	Level 1 (Rintisan)	Level 2 (Berkembang)	Level 2 (Berkembang)	Level 3 (Terdifinisi)	Level 2 Berkembang	Belum dilakukan penilaian	Level 2 Berkembang	Level 2 Berkembang	
6	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 2	Belum dilakukan penilaian	Level 3	Level 3	

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja Inspektorat dan hal-hal kritis terkait dengan pengawasan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengawasan, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang serta isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan penting/strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Adapun permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pada tahun 2017 antara lain:

- a. Masih terdapat temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti;
- b. Belum adanya sanksi yang tegas terhadap pengelolaan kinerja dan pengendalian internal yang kurang baik;
- c. Kualitas pelayanan publik masih harus ditingkatkan;
- d. Prosedur pengawasan belum dijalankan dengan baik;
- e. Komitmen dan motivasi APIP masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, dapat dirumuskan isu strategis sektor pengawasan yaitu:

1. Tingkat kepatuhan SKPD terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan masih sangat kurang.
2. Belum maksimalnya peran APIP sebagai pengawas internal pemerintah daerah

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Inspektorat dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Inspektorat dengan arahan Kepala daerah terkait dengan prioritas program/kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Inspektorat berdasarkan rancangan awal RKPD.

Proses yang dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Rumusan rencana program dan kegiatan yang diusulkan Inspektorat Kota Banjarbaru pada rancangan awal RKPD tahun 2017 seperti disajikan pada tabel 3 (tiga) sebagai berikut :

TABEL 3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018
KOTA BANJARBARU

Kode				Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
				Program & Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/keluaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program & Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/keluaran	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	02	1	01	Program Pelayanan administrasi Perkantoran		Indek Kepuasan Pelayanan Internal	100%	451.869.250	Program Pelayanan administrasi Perkantoran		Indek Kepuasan Pelayanan Internal	100%	451.869.250	
						Persentase Pengaduan/Laporan yang ditindaklanjuti sesuai SOP	100%				Persentase Pengaduan/ Laporan yang ditindaklanjuti sesuai SOP	100%		
4	02	1	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	300 lbr	1.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Dokumen Bermaterai	300 lbr	1.500.000	
4	02	1	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	Tersedianya layanan Jasa Telepon dan Internet	12 bulan	14.586.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik		Tersedianya layanan Jasa Telepon dan Internet	12 bulan	14.586.000	
4	02	1	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan	4 orang	38.400.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah Petugas Kebersihan	4 orang	38.400.000	
4	02	1	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah/jenis alat tulis kantor	40 Jenis	22.375.750	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah/jenis alat tulis kantor	40 Jenis	22.375.750	
4	02	1	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Barang Cetakan dan Pengadaan	8 Jenis	16.922.200	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan		Jumlah Barang Cetakan dan Pengadaan	8 Jenis	16.922.200	
4	02	1	01	13	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis	25.853.500	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis	25.853.500	
4	02	1	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan	Jumlah Bahan Bacaan	36 Set	8.640.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan		Jumlah Bahan Bacaan	36 Set	8.640.000	
4	02	1	01	17	Penyediaan Makan dan Minuman	Waktu penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	88.740.000	Penyediaan Makan dan Minuman		Waktu penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	88.740.000	
4	02	1	01	18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi/konsultasi	15 kali	160.440.000	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi/konsultasi	15 kali	160.440.000	
4	02	1	01	19	Penyediaan Jasa Non PNS	JumlahTenaga Kontrak	4 orang	37.800.000	Penyediaan Jasa Non PNS		JumlahTenaga Kontrak	4 orang	37.800.000	
4	02	1	01	23	Pendataan LP2P	Jumlah dokumen laporan Pendataan LP2P tepat waktu	1 buah	36.611.800	Pendataan LP2P		Jumlah dokumen laporan Pendataan LP2P tepat waktu	1 buah	36.611.800	
4	02	1	02		Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur	Persentase keluhan pengaduan layanan internal yang ditindaklanjuti.	100%	121.325.000	Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur		Persentase keluhan pengaduan layanan internal yang ditindaklanjuti.	100%	121.325.000	
4	02	1	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil dinas/operasional dalam kondisi baik	2 buah	35.350.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan		Jumlah mobil dinas/operasional dalam kondisi baik	2 buah	35.350.000	
4	02	1	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah mobil dinas/operasional dalam kondisi baik	9 unit	66.375.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah mobil dinas/operasional dalam kondisi baik	9 unit	66.375.000	
4	02	1	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan asset/barang inventaris perlengkapan gedung kantor secara berkala	15 kali	3.750.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Pemeliharaan asset/barang inventaris perlengkapan gedung kantor secara berkala	15 kali	3.750.000	
4	02	1	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan asset/barang inventaris peralatan gedung kantor secara berkala	41 kali	15.850.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Pemeliharaan asset/barang inventaris peralatan gedung kantor secara berkala	41 kali	15.850.000	
4	02	1	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai hasil evaluasi AKIP Inspektorat	B	29.273.700	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Nilai hasil evaluasi AKIP Inspektorat	B	29.273.700	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program & Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/keluaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program & Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/keluaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Persentase temuan BPK/Inspektorat Provinsi yang ditindaklanjuti	100%				Persentase temuan BPK/Inspektorat Provinsi yang ditindaklanjuti	100%		
4	02		1	06	05		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan tepat waktu	10 buah	17.728.700		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan tepat waktu	10 buah	17.728.700
							Jumlah laporan keuangan tepat waktu	1 dokumen				Jumlah laporan keuangan tepat waktu	1 dokumen		
							Waktu penyelesaian Surat Perintah Membayar yang dinyatakan lengkap dan syah secara tepat waktu	1 hari				Waktu penyelesaian Surat Perintah Membayar yang dinyatakan lengkap dan syah secara tepat waktu	1 hari		
4	02		1	06	09		Pperencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	Kesesuaian BMD Inspektorat dengan neraca asset	100%	11.545.000		Pperencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	Kesesuaian BMD Inspektorat dengan neraca asset	100%	11.545.000
4	02		06		20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase SOPD pada wilayah 1 yang tidak mendapat temuan administrasi dan kerugian negara	100%	2.017.126.650		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase SOPD pada wilayah 1 yang tidak mendapat temuan administrasi dan kerugian negara	100%	2.017.126.650
							Persentase SOPD pada wilayah 2 yang tidak mendapat temuan administrasi dan kerugian negara	100%				Persentase SOPD pada wilayah 2 yang tidak mendapat temuan administrasi dan kerugian negara	100%		
							Persentase SOPD pada wilayah 3 yang tidak mendapat temuan administrasi dan kerugian negara	100%				Persentase SOPD pada wilayah 3 yang tidak mendapat temuan administrasi dan kerugian negara	100%		
4	20		06		20	01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Dokumen LHP reguler	96 buah	1.007.890.000		Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Dokumen LHP reguler	96 buah	1.007.890.000
							Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti tepat waktu oleh wilayah 1	100%				Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti tepat waktu oleh wilayah 1	100%		
							Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti tepat waktu oleh wilayah 2	100%				Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti tepat waktu oleh wilayah 2	100%		
							Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti tepat waktu oleh wilayah 3	100%				Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti tepat waktu oleh wilayah 3	100%		
4	20		06		20	2	Penanganan Kasus & Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen LHP kasus pengaduan masyarakat	15 buah	157.996.900		Penanganan Kasus & Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen LHP kasus pengaduan masyarakat	15 buah	157.996.900
							Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti SOPD pada wilayah 1	100%				Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti SOPD pada wilayah 1	100%		
							Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti SOPD pada wilayah 2	100%				Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti SOPD pada wilayah 2	100%		
							Persentase rekomendasi pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti 3	100%				Persentase rekomendasi pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti 3	100%		
4	20		06		20	06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah dokumen laporan monitoring TLHP APIP	14 buah	300.241.000		Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah dokumen laporan monitoring TLHP APIP	14 buah	300.241.000

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program & Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/keluaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program & Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/keluaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Persentase rekomendasi hasil revidi LKPD yang ditindaklanjuti tepat waktu oleh wilayah 1	100%				Persentase rekomendasi hasil revidi LKPD yang ditindaklanjuti tepat waktu oleh wilayah 1	100%		
							Persentase rekomendasi hasil revidi LKPD yang ditindaklanjuti tepat waktu oleh wilayah 2	100%				Persentase rekomendasi hasil revidi LKPD yang ditindaklanjuti tepat waktu oleh wilayah 2	100%		
							Persentase rekomendasi hasil revidi LKPD yang ditindaklanjuti tepat waktu oleh wilayah 3	100%				Persentase rekomendasi hasil revidi LKPD yang ditindaklanjuti tepat waktu oleh wilayah 3	100%		
4	20	06	20	12	Review Laporan Keuangan		Jumlah dokumen laporan revidi LKPD	1 buah	52.538.750	Review Laporan Keuangan		Jumlah dokumen laporan revidi LKPD	1 buah	52.538.750	
							Persentase SOPD yang mendapat evaluasi wilayah 1 telah menyusun SOP SOPD	63,63%				Persentase SOPD yang mendapat evaluasi wilayah 1 telah menyusun SOP SOPD	63,63%		
							Persentase SOPD yang mendapat evaluasi wilayah 2 telah menyusun SOP SOPD	81,81%				Persentase SOPD yang mendapat evaluasi wilayah 2 telah menyusun SOP SOPD	81,81%		
							Persentase SOPD yang mendapat evaluasi wilayah 3 telah menyusun SOP SOPD	77,77%				Persentase SOPD yang mendapat evaluasi wilayah 3 telah menyusun SOP SOPD	77,77%		
4	20	06	20	13	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah		Jumlah dokumen laporan penilaian SPIP	2 buah	126.976.200	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah		Jumlah dokumen laporan penilaian SPIP	2 buah	126.976.200	
							Persentase SOPD yang dievaluasi wilayah 1 telah tertib administrasi barang/asset daerah	100%				Persentase SOPD yang dievaluasi wilayah 1 telah tertib administrasi barang/asset daerah	100%		
							Persentase SOPD yang dievaluasi wilayah 2 telah tertib administrasi barang/asset daerah	100%				Persentase SOPD yang dievaluasi wilayah 2 telah tertib administrasi barang/asset daerah	100%		
							Persentase SOPD yang dievaluasi wilayah 3 telah tertib administrasi barang/asset daerah	100%				Persentase SOPD yang dievaluasi wilayah 3 telah tertib administrasi barang/asset daerah	100%		
4	20	06	20	14	Pengawasan Inventarisasi Asset		Jumlah dokumen laporan inventarisasi asset	2 buah	64.182.000	Pengawasan Inventarisasi Asset		Jumlah dokumen laporan inventarisasi asset	2 buah	64.182.000	
							Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti SOPD pada wilayah 1	100%				Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti SOPD pada wilayah 1	100%		
							Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti SOPD pada wilayah 2	100%				Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti SOPD pada wilayah 2	100%		
							Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti SOPD wilayah 3	100%				Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti SOPD wilayah 3	100%		
4	20	06	20	16	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK		Jumlah dokumen laporan monitoring TLHP BPK	10 buah	100.465.900	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK		Jumlah dokumen laporan monitoring TLHP BPK	10 buah	100.465.900	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
					Program & Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/keluaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program & Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/keluaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							Persentase SOPD yang dievaluasi wilayah 1 telah tertib mengimplementasikan SAP.	100%				Persentase SOPD yang dievaluasi wilayah 1 telah tertib mengimplementasikan SAP.	100%			
							Persentase SOPD yang dievaluasi wilayah 2 telah tertib mengimplementasikan SAP.	100%				Persentase SOPD yang dievaluasi wilayah 2 telah tertib mengimplementasikan SAP.	100%			
							Persentase SOPD yang dievaluasi wilayah 3 telah tertib mengimplementasikan SAP.	100%				Persentase SOPD yang dievaluasi wilayah 3 telah tertib mengimplementasikan SAP.	100%			
4	20	06	20	17	Pengawasan dan Pengendalian Kas Opname SKPD Pada Akhir Tahun		Jumlah dokumen laporan pengawasan kas opname	1 buah	77.760.900	Pengawasan dan Pengendalian Kas Opname SKPD Pada Akhir Tahun		Jumlah dokumen laporan pengawasan kas opname	1 buah	77.760.900		
							Persentase SOPD pada wilayah 1 yang mendapat nilai evaluasi AKIP minimal B	81,81%				Persentase SOPD pada wilayah 1 yang mendapat nilai evaluasi AKIP minimal B	81,81%			
							Persentase SOPD pada wilayah 2 yang mendapat nilai evaluasi AKIP minimal B	81,81%				Persentase SOPD pada wilayah 2 yang mendapat nilai evaluasi AKIP minimal B	81,81%			
							Persentase SOPD pada wilayah 3 yang mendapat nilai evaluasi AKIP minimal B	100%				Persentase SOPD pada wilayah 3 yang mendapat nilai evaluasi AKIP minimal B	100%			
4	20	6	20	18	Evaluasi LAKIP SKPD		Jumlah dokumen laporan evaluasi SAKIP SKPD	5 buah	129.075.000	Evaluasi LAKIP SKPD		Jumlah dokumen laporan evaluasi SAKIP SKPD	5 buah	129.075.000		
4	20	06	21		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan & Aparatur Pengawasan		Cakupan APIP pada wilayah 1 yang memiliki sertifikat diklat profesi.	88,23%	195.378.400	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan & Aparatur Pengawasan		Cakupan APIP pada wilayah 1 yang memiliki sertifikat diklat profesi.	88,23%	195.378.400		
							Cakupan APIP pada wilayah 2 yang memiliki sertifikat diklat profesi.	82,35%				Cakupan APIP pada wilayah 2 yang memiliki sertifikat diklat profesi.	82,35%			
							Cakupan APIP pada wilayah 3 yang memiliki sertifikat diklat profesi.	100%				Cakupan APIP pada wilayah 3 yang memiliki sertifikat diklat profesi.	100%			
							Cakupan APIP pada wilayah 1 yang memiliki sertifikat diklat Substantif/Tekhnis	82,35%				Cakupan APIP pada wilayah 1 yang memiliki sertifikat diklat Substantif/Tekhnis	82,35%			
							Cakupan APIP pada wilayah 2 yang memiliki sertifikat diklat Substantif/Tekhnis	76,47%				Cakupan APIP pada wilayah 2 yang memiliki sertifikat diklat Substantif/Tekhnis	76,47%			
							Cakupan APIP pada wilayah 3 yang memiliki sertifikat diklat Substantif/Tekhnis	83,33%				Cakupan APIP pada wilayah 3 yang memiliki sertifikat diklat Substantif/Tekhnis	83,33%			
4	20	09	24	08	Diklat Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		Jumlah Peserta Diklat Pengawasan	30 orang	195.378.400	Diklat Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		Jumlah Peserta Diklat Pengawasan	30 orang	195.378.400		
JUMLAH									2.814.973.000						2.814.973.000	

Rekapitulasi :

1 Program Pelayanan administrasi Perkantoran, didukung dengan 11 kegiatan dan anggaran sebesar	451.869.250
2 Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur, didukung dengan 9 kegiatan dan anggaran sebesar	121.325.000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan, didukung dengan	29.273.700

451.869.250
121.325.000
29.273.700

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program & Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/keluaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program & Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/keluaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH,			2.017.126.650					2.017.126.650		
	5 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan & Aparatur Pengawasan, didukung dengan			195.378.400					195.378.400		
				2.814.973.000					2.814.973.000		

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian terhadap usulan program dan kegiatan merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan sesuai tugas dan fungsi SKPD terkait.

Pada usulan program dan kegiatan tahun 2017, Inspektorat Kota Banjarbaru belum melakukan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, baik yang secara langsung menjadi program dan kegiatan pada Inspektorat, maupun yang bersifat bantuan/hibah kepada masyarakat, akan tetapi dalam usulan program/kegiatan tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya Inspektorat Kota Banjarbaru selalu memperhatikan aspirasi, keinginan dan harapan masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan (JAKWAS) di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 ditetapkan Kementrian Dalam Negeri untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. JAKWAS sebagai acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan dan pengawasan di lingkungan Kementrian dalam Negeri, Kementrian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah dan bertujuan antara lain untuk mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementrian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah dan bertujuan antara lain untuk mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Sinkronisasi dan sinergi pengawasan yang ditetapkan dalam JAKWAS tahun 2017, dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementrian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kabupaten Kota dalam bentuk:

- a). Pengawasan umum.
- b). Pengawasan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dan;
- c). Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah.

Kegiatan pengawasan yang menjadi kewenangan Inspektorat Kabupaten/Kota difokuskan pada pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota, dan kegiatan pengawasan yang diusulkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru tahun 2017 meliputi :

1. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan meliputi :
 - a). Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
 - b). Reviu Rencana Kerja Anggaran

- c). Reviu Laporan Keuangan.
- 2. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik di lingkungan Kabupaten/Kota meliputi :
 - a) Mengawal Reformasi Birokrasi melalui kegiatan :
 - Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
 - Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
 - b). Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
- 3 Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi:
 - a). Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan.
 - b). Koordinasi program pengawasan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran Renja adalah untuk memberikan arah bagi SKPD selaku pelaksana urusan pemerintah daerah dalam upaya mendukung pelaksanaan visi dan misi Pembangunan Daerah.

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat tahun 2016 dan tahun berjalan (2017), serta didasarkan atas perumusan permasalahan dan isu-isu penting/ strategis penyelenggaraan tugas

dan fungsi pengawasan pada tahun 2018 yang merupakan tahun ke 3 (tiga) pelaksanaan Renstra Inspektorat Kota Banjarbaru tahun 2016-2021, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru tahun 2018 ditetapkan adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Renstra Inspektorat Kota Banjarbaru tahun 2016-2021 yaitu:

”MEWUJUDKAN PENGAWASAN YANG BERINTEGRITAS”

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi yang menjadi tanggungjawab Inspektur dan seluruh jajarannya yaitu:

1. Meningkatkan Pengawasan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Pada pelayanan Publik.
2. Meningkatkan Peranan APIP Sebagai Quality Assurance.

Untuk merealisasikan misi tersebut maka dirumuskan tujuan dan sasaran misi seperti yang termuat dalam Renstra Inspektorat Kota Banjarbaru periode tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
	Menurunnya temuan hasil pemeriksaan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta

	kualitas pelayanan publik
	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
	Meningkatkan Peranan APIP

Untuk menilai capaian masing-masing sasaran, telah ditetapkan indikator sasaran dengan target kinerja yang jelas dan terukur adalah sebagai berikut:

Sasaran	Indikator sasaran	Target
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai SAKIP SKPD	B
	Nilai SAKIP Inspektorat	B
Menurunnya temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase temuan hasil pemeriksaan Eksternal (BPK) ditindaklanjuti SKPD sesuai ketentuan	98,50%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta kualitas pelayanan publik	Persentase temuan BPK/Inspektorat Prov pada Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%
Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Level Maturitas SPIP	Level 2 (Berkembang)

Meningkatkan Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3
-------------------------------	------------------------	---------

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam upaya mendukung prioritas pembangunan Kota Banjarbaru tahun 2018, maka prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan program utama pengawasan adalah Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Apabila dikaitkan dengan misi pembangunan Kota Banjarbaru, kegiatan Inspektorat adalah bersifat fasilitasi, yang mana dapat memberikan solusi bagi setiap pelaksana urusan kegiatan pemerintah daerah.

Rencana Program dan kegiatan yang diusulkan Inspektorat dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2018, mencakup semua rencana program/kegiatan prioritas, program/kegiatan penunjang yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas rutin, administrasi & pelaporan serta penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang akan dianggarkan pada belanja langsung sebagaimana disajikan dalam tabel 5 (lima). Rumusan Rencana program dan kegiatan Inspektorat Kota Banjarbaru tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 5
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SOPD TAHUN 2018
KOTA BANJARBARU

NAMA SOPD : INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/keluaran	Rencana Tahun 2018			Catatan penting
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 02	1 01			Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Indek Kepuasan Pelayanan Internal	Banjarbaru	100%	451.869.250	APBD
					Persentase Pengaduan/Laporan yang ditindaklanjuti sesuai SOP		100%		
4 02	1 01	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai		300 lbr	1.500.000	
4 02	1 01	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	Tersedianya layanan Jasa Telepon dan Internet		12 bulan	14.586.000	
4 02	1 01	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan		4 orang	38.400.000	
4 02	1 01	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah/jenis alat tulis kantor		40 Jenis	22.375.750	
4 02	1 01	11		Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan		8 Jenis	16.922.200	
4 02	1 01	13		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4 Jenis	25.853.500	
4 02	1 01	15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan		36 Set	8.640.000	
4 02	1 01	17		Penyediaan Makan dan Minuman	Waktu penyediaan makanan dan minuman		12 bulan	88.740.000	
4 02	1 01	18		Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi/konsultasi		15 kali	160.440.000	
4 02	1 01	19		Penyediaan Jasa Non PNS	JumlahTenaga Kontrak		4 orang	37.800.000	
4 02	1 01	23		Pendataan LP2P	Jumlah dokumen laporan Pendataan LP2P tepat waktu		1 buah	36.611.800	
4 02	1 02			Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur	Persentase keluhan pengaduan layanan internal yang ditindaklanjuti.	Banjarbaru	100%	121.325.000	APBD
4 02	1 02	23		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil dinas/operasional dalam kondisi baik		2 buah	35.350.000	
4 02	1 02	24		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah mobil dinas/operasional dalam kondisi baik		9 unit	66.375.000	
4 02	1 02	26		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan aset/barang inventaris perlengkapan gedung kantor secara berkala		15 kali	3.750.000	
4 02	1 02	28		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan aset/barang inventaris peralatan gedung kantor secara berkala		41 kali	15.850.000	
4 02	1 06			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai hasil evaluasi AKIP Inspektorat	Banjarbaru	B	29.273.700	APBD
					Persentase temuan BPK/Inspektorat Provinsi yang ditindaklanjuti		100%		
4 02	1 06	05		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan tepat waktu		10 buah	17.728.700	
					Jumlah laporan keuangan tepat waktu		1 dokumen		
					Waktu penyelesaian Surat Perintah Membayar yang dinyatakan lengkap dan syah secara tepat waktu		1 hari		
4 02	1 06	09		Pperencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	Kesesuaian BMD Inspektorat dengan neraca asset		100%	11.545.000	
4 02	06	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase SOPD pada wilayah 1 yang tidak mendapat temuan administrasi dan kerugian negara		100%	2.017.126.650	APBD
					Persentase SOPD pada wilayah 2 yang tidak mendapat temuan administrasi dan kerugian negara		100%		
					Persentase SOPD pada wilayah 3 yang tidak mendapat temuan administrasi dan kerugian negara		100%		
4	20	06	20	01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Dokumen LHP reguler		96 buah	1.007.890.000
					Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti tepat waktu oleh wilayah 1		100%		
					Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti tepat waktu oleh wilayah 2		100%		
					Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti tepat waktu oleh wilayah 3		100%		
4	20	06	20	2	Penanganan Kasus & Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen LHP kasus pengaduan masyarakat		15 buah	157.996.900
					Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti SOPD pada wilayah 1		100%		
					Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti SOPD pada wilayah 2		100%		
					Persentase rekomendasi pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti 3		100%		
4	20	06	20	06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah dokumen laporan monitoring TLHP APiP		14 buah	300.241.000
					Persentase rekomendasi hasil reviu LKPD yang ditindaklanjuti tepat waktu oleh wilayah 1		100%		
					Persentase rekomendasi hasil reviu LKPD yang ditindaklanjuti tepat waktu oleh wilayah 2		100%		
					Persentase rekomendasi hasil reviu LKPD yang ditindaklanjuti tepat waktu oleh wilayah 3		100%		
4	20	06	20	12	Review Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan reviu LKPD		1 buah	52.538.750
					Persentase SOPD yang mendapat evaluasi wilayah 1 telah menyusun SOP SOPD		63,63%		
					Persentase SOPD yang mendapat evaluasi wilayah 2 telah menyusun SOP SOPD		81,81%		
					Persentase SOPD yang mendapat evaluasi wilayah 3 telah menyusun SOP SOPD		77,77%		
4	20	06	20	13	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Jumlah dokumen laporan penilaian SPIP		2 buah	126.976.200
					Persentase SOPD yang dievaluasi wilayah 1 telah tertib administrasi barang/asset daerah		100%		
					Persentase SOPD yang dievaluasi wilayah 2 telah tertib administrasi barang/asset daerah		100%		
					Persentase SOPD yang dievaluasi wilayah 3 telah tertib administrasi barang/asset daerah		100%		
4	20	06	20	14	Pengawasan Inventarisasi Asset	Jumlah dokumen laporan inventarisasi asset		2 buah	64.182.000
					Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti SOPD pada wilayah 1		100%		
					Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti SOPD pada wilayah 2		100%		
					Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti SOPD wilayah 3		100%		
4	20	06	20	16	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK	Jumlah dokumen laporan monitoring TLHP BPK		10 buah	100.465.900

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/keluaran	Rencana Tahun 2018				Catatan penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1					2	3	4	5	6	7	
						Persentase SOPD yang dievaluasi wilayah 1 telah tertib mengimplementasikan SAP.		100%			
						Persentase SOPD yang dievaluasi wilayah 2 telah tertib mengimplementasikan SAP.		100%			
						Persentase SOPD yang dievaluasi wilayah 3 telah tertib mengimplementasikan SAP.		100%			
4	20	06	20	17	Pengawasan dan Pengendalian Kas Opname SKPD Pada Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan pengawasan kas opname		1 buah	77.760.900		
						Persentase SOPD pada wilayah 1 yang mendapat nilai evaluasi AKIP minimal B		81,81%			
						Persentase SOPD pada wilayah 2 yang mendapat nilai evaluasi AKIP minimal B		81,81%			
						Persentase SOPD pada wilayah 3 yang mendapat nilai evaluasi AKIP minimal B		100%			
4	20	6	20	18	Evaluasi LAKIP SKPD	Jumlah dokumen laporan evaluasi SAKIP SKPD		5 buah	129.075.000		
4	20	06	21		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan & Aparatur Pengawasan	Cakupan APIP pada wilayah 1 yang memiliki sertifikat diklat profesi.	Banjarbaru	88,23%	195.378.400	APBD	
						Cakupan APIP pada wilayah 2 yang memiliki sertifikat diklat profesi.		82,35%			
						Cakupan APIP pada wilayah 3 yang memiliki sertifikat diklat profesi.		100%			
						Cakupan APIP pada wilayah 1 yang memiliki sertifikat diklat Substantif/Tekhnis		82,35%			
						Cakupan APIP pada wilayah 2 yang memiliki sertifikat diklat Substantif/Tekhnis		76,47%			
						Cakupan APIP pada wilayah 3 yang memiliki sertifikat diklat Substantif/Tekhnis		83,33%			
4	20	09	24	08	Diklat Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Peserta Diklat Pengawasan		30 orang	195.378.400		
JUMLAH									2.814.973.000		

Rekapitulasi :

- 1 Program Pelayanan administrasi Perkantoran, didukung dengan 11 kediatan dan anggaran sebesar
- 2 Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur, didukung dengan 9 kegiatan dan anggaran sebesar
- 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan, didukung dengan 2 kegiatan
- 4 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, didukung dengan
- 5 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan & Aparatur Pengawasan, didukung dengan 3 kegiatan

451.869.250
121.325.000
29.273.700
2.017.126.650

195.378.400
Jumlah 2.814.973.000

Banjarbaru, Juni 2017
INSPEKTUR KOTA BANJARBARU,

Drs.M.SYAIFULLAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19571116 198602 1 002

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Banjarbaru tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun bertujuan untuk memberikan arah bagi Inspektorat selaku pelaksana urusan pemerintah daerah dalam upaya mendukung pelaksanaan visi dan misi Pembangunan Kota Banjarbaru.

Renja Inspektorat tahun 2018 dimaksudkan sebagai pedoman resmi bagi Inspektorat dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2018 dan sebagai acuan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat kedepan.

Rencana Kerja (Renja) disusun dan ditetapkan untuk mensinergikan rencana pembangunan tahunan SKPD dengan rencana pembangunan tahunan daerah, dan nasional, sehingga menghasilkan perencanaan tahunan yang bermutu, akuntabel, dan tepat waktu.

Banjarbaru, 29 Juni 2017

INSPEKTUR KOTA BANJARBARU



Drs. M. SYAIFULLAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19571116 198602 1 002